



TAJUK	<p>Pemerintah bakal kembali membuat kebijakan baru mengenai pengaturan lalu lintas di kawasan Malioboro, Kota Jogja.</p> <p>Dinas Perhubungan (Dishub) DIY berencana memperpanjang durasi pelaksanaan Malioboro semi pedestrian atau Malioboro bebas kendaraan dari yang semula hanya tiga jam menjadi lima atau enam jam.</p> <p>Kebijakan ini ditempuh guna mengatasi kemacetan akibat pertumbuhan kendaraan yang signifikan di wilayah setempat terutama Kota Jogja.</p> <p>Semi pedestrian Malioboro diterapkan beberapa tahun lalu dengan jam berlaku sejak pukul</p>	<p>Antisipasi Kemacetan di Jogja sejak Jauh Hari</p> <p>18.00 WIB-21.00 WIB. Selama penerapannya, hanya bus Trans Jogja, kendaraan penanganan darurat dan kendaraan khusus yang boleh melintas di jantung Kota Jogja itu.</p> <p>Rencana memperpanjang durasi Malioboro semi pedestrian ini merespons kondisi lalu lintas yang kerap padat di kawasan perkotaan terutama pada saat musim liburan, tak terkecuali Malioboro dan sekitarnya. Rencananya tahun ini Malioboro bebas kendaraan akan mulai diterapkan sejak pukul 15.00 WIB atau 16.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.</p> <p>Kami mengapresiasi upaya pemerintah mengatasi kemacetan yang tak kunjung selesai di Jogja.</p>	<p>Namun demikian perlu ada kajian mendalam serta kesiapan matang agar kebijakan menambah durasi Malioboro bebas kendaraan ini tidak justru menimbulkan titik kemacetan baru.</p> <p>Fokus kajian dan solusi perlu ditunjukkan di kawasan sirip atau sekitar Malioboro yang potensial menjadi tumpuan lalu lintas kendaraan saat kebijakan baru ini diberlakukan. Harus ada pengaturan lalu lintas dan antisipasi di seputaran kawasan seperti Titik Nol Kilometer, Jalan Mataram, Jalan Abu Bakar Ali sampai ke Jalan KH. Ahmad Dahlan.</p> <p>Tidak hanya itu, kawasan Jalan Pasar Kembang dan</p>	<p>kawasan dari Tuju Jogja perlu mendapat perhatian serius karena menjadi jalur kedatangan dan keberangkatan penumpang kereta api di Stasiun Tuju Jogja.</p> <p>Pemerintah sebaiknya melakukan uji coba sebelum menerapkan kebijakan ini. Selain itu yang penting juga dipikirkan adalah kebijakan ke depannya.</p> <p>Apakah memperpanjang durasi Malioboro bebas kendaraan sudah cukup sebagai cara mengatasi kemacetan. Perlu dipikirkan juga skenario jangka panjang potensi kemacetan di DIY. Apalagi sudah ada data dan fakta mengenai potensi kemacetan parah di Jogja.</p> <p>Beberapa waktu lalu, sebuah penelitian menyebut kemacetan</p>	<p>di Jogja diprediksi akan menjadi seperti Jakarta pada 2030 apabila melihat pertumbuhan kendaraan saat ini. Penelitian ini sejalan dengan data di kepolisian yang menyebut ada penambahan 3.000 kendaraan setiap pekannya di Jogja.</p> <p>Kondisi ini tidak bisa dipandang enteng. Skenario dan antisipasi yang matang harus dilakukan sejak jauh hari. Jangan sampai kita terlambat mengantisipasi ledakan kemacetan, seperti halnya kita terlambat mengantisipasi penuhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Setelah krisis sumpah jangan sampai muncul krisis kemacetan di Jogja tercinta.</p>
--------------	---	---	--	---	--

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005